

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan sumber daya manusia. Hal ini dapat dicapai melalui pembentukan industri atau usaha kecil dan menengah yang merupakan bagian penting dalam meningkatkan ekonomi nasional melalui pengembangan bisnis. Usaha kecil dan menengah berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan mengakhiri kemiskinan masyarakat. Untuk memastikan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat dapat dirasakan secara keseluruhan, diperlukan tindakan yang matang dan penetapan tujuan yang jelas.¹

Peningkatan ekonomi sendiri diartikan ketika berkembang dari keadaan yang buruk ke keadaan yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.² Meskipun demikian, karena sebagian besar penduduk berpendidikan rendah dan bekerja dalam usaha kecil di sektor tradisional dan modern, pemerintah melakukan banyak hal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya adalah mengembangkan pelaku

¹ Pradnya Paramita Hapsari, Abdullah Hakim Saleh Soeidy, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil menengah (UKM) terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi di Pemerintahan Kota Batu)*. Jurnal Wacana Vol. 17, No. 2, 2014, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, <https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/308>.

² Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), h. 59

usaha kecil. Pada dasarnya, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.³ Dalam konteks teori pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi harus menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan, dengan memberikan akses, kesempatan, dan penguatan kapasitas agar masyarakat mampu mengelola usaha dan kehidupannya secara mandiri.⁴

Karena besarnya peranan pelaku usaha dalam menopang perekonomian suatu negara, maka negara sangat mengharapkan keberadaan pelaku usaha. Ini disebabkan oleh peran besarnya dalam kemajuan dan perkembangan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) dapat mengurangi pengangguran dengan menyerap karyawan yang siap bekerja tetapi tidak memiliki pekerjaan. Dengan pertumbuhan sektor ini, pendapatan masyarakat akan meningkat, dan pelaku usaha akan mempekerjakan lebih banyak orang, membantu pemerintah mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan oleh para pelaku usaha ini, yang memungkinkan penyebaran hasil pembangunan yang lebih baik, yang dapat meningkatkan rasa terima kasih masyarakat.⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan

³Mhammad Jafar Hafsah, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, "Jurnal Infokop, no. 25 (2004): 1–17, <http://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jsi/index>

⁴ Edi Suharto, *"Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial"* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 57.

⁵Salman Al Farisi, "Peran Pelaku Usaha (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 1 (2022), h. 20-22, doi: <https://doi.org/10.53429/jdes.v9>

masyarakat yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan bisnis dalam berbagai bidang ekonomi.⁶

Pada saat ini produksi pelaku usaha belum meningkatkan ekonomi negara secara substansial. Ini karena sektor bisnis masih menghadapi banyak hambatan. Akibatnya, banyak bisnis kecil di setiap daerah tidak menerima bantuan yang cukup, sehingga mereka kurang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan daripada bisnis besar. Masalah internal, eksternal, dan struktural adalah kategori yang dapat digunakan untuk membagi sektor pelaku usaha di Indonesia.⁷ Oleh karena itu, penerapan teori pemberdayaan masyarakat menjadi relevan, karena melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan, dan dukungan kelembagaan, UMKM dapat berkembang lebih optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Salah satu lembaga yang mengurus para pelaku usaha adalah Dinas Koperasi dan UKM yang memainkan peran penting dalam melaksanakan sebagian besar urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan koperasi

⁶ *Ibid.*

⁷ Budiarto Rachmawan dkk, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 26-52.

⁸ Kartasasmata, Ginandjar. *"Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan"* (Jakarta: CIDES, 1996), h. 112.

dan UKM. Pengembangan pelaku usaha selalu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi daerah karena keberadaan mereka sangat penting untuk meningkatkan ekonomi baik di daerah maupun pusat. Ini adalah salah satu bagian dari otonomi daerah di bidang peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha. Berdasarkan data Dinas Koperasi dapat diketahui bahwasanya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memiliki lebih dari 40.000 pelaku usaha atau UMKM yang terdaftar.

Tabel 1.1
Grafik Data Base Pelaku Usaha yang terdaftar di
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Tahun	Jumlah UMKM
2021	38.000
2022	39.924
2023	42.282
2024	47.692
2025	47.289

Sumber: Data Base Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Diolah Peneliti
Tahun 2025

Pada tabel di atas Jumlah UMKM di Kota Padang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2024, yakni dari sekitar 38.000 unit menjadi 47.692 unit, dengan pertumbuhan paling signifikan terjadi pada tahun 2024 yang naik sekitar 12,8% dibanding tahun sebelumnya, namun pada awal 2025 terjadi sedikit penurunan menjadi 47.289 unit. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan perkembangan positif sektor UMKM

di Kota Padang yang terus tumbuh dan berperan penting dalam perekonomian daerah, meskipun fluktuasi pada 2025 menandakan perlunya strategi penguatan dan pendampingan usaha agar pelaku UMKM dapat bertahan serta berkembang secara berkelanjutan.⁹

Dari beberapa pelaku usaha yang ada di Kota Padang tersebut peneliti mengambil data yang berasal dari Kecamatan Kuranji Kota Padang. Sebanyak lima orang pelaku usaha tersebut ditemukan memiliki penghasilan sebanyak 2.000.000 sampai dengan 3.000.000 per bulan. Berikut adalah datanya:

Tabel 1.2 Pelaku Usaha dari Kuranji

No	Pelaku Usaha	Jenis Usaha	Jumlah Pelatihan yang diikuti
1.	Zal Jufri	Kampiun Ayah	3
2.	Deka Yuli Fadilah	Ayam Batokok	3
3.	Alimar	Gado-gado rumah gadang	2
4.	Addina Ma'arif	Es Teller	3
5.	Faizah Rustam	Lontong daun pisang	2

Hasil wawancara awal yang telah penulis lakukan bersama salah seorang pelaku usaha yang bernama Deka Yuli Fadilah yang memiliki usaha dalam bidang makanan menyatakan bahwa:

⁹Padang Kita, *Banyak UMKM Terkendala Modal, Ini Solusi Pemko Padang*. Diakses pada 13 Juni 2024 pukul 09.00 dari <https://padangkita.com/banyak-umkm-terkendala-modal-ini-solusi-pemko-padang>.

“Saya dulunya bekerja sebagai buruh, akan tetapi adanya pemberhentian beberapa karyawan di sana, termasuk saya sendiri yang mengalaminya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya memilih berjualan, modal ini sendiri berasal dari tabungan yang saya punya berserta istri. Karna kan umur saya sudah tidak muda lagi, jadi kalau mencari kerja saat sekarang itu sangat susah, untuk itu saya memilih berjualan”¹⁰

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan peningkatan jumlah pelaku usaha di Kota Padang, khususnya Kecamatan Kuranji adalah karena berhentinya seseorang dari pekerjaan yang sebelumnya dimiliki. Berbagai pelaku usaha tersebut mengalami beberapa kendala dalam bidang permodalan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu pelaku usaha yang bernama Faizah Rustam yang juga berjualan pada produk makanan, sebagai berikut:

“Bahwasanya usaha saya saat ini terancam bangkrut karena sudah tidak banyak orang yang membeli. Saya berjualan lontong daun pisang, namun sejak memasuki masa libur perkuliahan, pendapatan saya menurun drastis dibanding biasanya. Selain itu, saya juga harus membayar sewa kontrak kedai untuk satu tahun ke depan, sementara pemilik sudah mulai menagih pembayaran.”¹¹

Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pedagang lainnya, dan kebanyakan dari para pelaku usaha mengalami kekurangan modal untuk berjualan, sedangkan pemasukan tidak mencukupi untuk menutupi biaya bahan pokok dan sewa lainnya. Dengan adanya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang hadir sebagai lembaga yang mengembangkan pelaku usaha dengan melaksanakan urusan

¹⁰ Deka Yuli Fadilah, Pelaku Usaha, *Wawancara Langsung* 20 Mei 2025

¹¹ Faizah Rustam, Pelaku Usaha, *Wawancara Langsung* 20 Mei 2025

pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta tugas bantuan yang diberikan oleh daerah.

Selain itu, sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang telah menyusun Dokumen Perencanaan Renstra tahun 2019–2024. Dokumen tersebut pada dasarnya menetapkan kembali tujuan dan sasaran strategis, yaitu “*meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan*”, dengan salah satu indikatornya berupa persentase penambahan pelaku usaha mikro yang berhasil “naik kelas”.¹² Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM, seperti memulihkan kegiatan usaha, meningkatkan permintaan, memperbaiki kualitas produk, serta menarik dan mempertahankan pelanggan. Upaya tersebut juga perlu diperkuat dengan adanya program pembinaan yang berkelanjutan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

Jumlah UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang terus meningkat, dan Kota Padang telah diberi penghargaan atas prestasinya dalam mengembangkan sektor UMKM. Namun, peningkatan UMKM tersebut tidak terlepas dari masalah yang ada. Kendala utama bagi pertumbuhan bisnis Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Padang adalah kekurangan modal. Pelaku usaha juga dianggap tidak memiliki kemampuan yang cukup. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih

¹² Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Tahun 2021, h. 32

lanjut mengenai **“Pembinaan Pelaku Usaha Kecamatan Kuranji Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Padang Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat”**

b. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **“Pembinaan Pelaku Usaha Kecamatan Kuranji Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Padang Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat”**.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih singkat, terarah, dan tidak melebar ke dalam hal-hal yang tidak penting, maka peneliti merasa perlu untuk membatasi masalah penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan keterampilan pelaku usaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat
- b. Penguatan kapasitas terhadap Pelaku Usaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat
- c. Peningkatan kesadaran diri masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis terangkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengembangan keterampilan pelaku usaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Untuk mengetahui penguatan kapasitas pelaku usaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Untuk mengidentifikasi peningkatan kesadaran diri masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup teoritis dan praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam menganalisis bentuk pembinaan pelaku usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa yang tertarik untuk mendalami strategi

pembinaan dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama dalam perspektif pemberdayaan berbasis nilai-nilai Islam.

- c. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian serupa yang membahas bentuk pembinaan dan dampak pemberdayaan ekonomi di daerah lain, sehingga dapat memberikan perbandingan dan kajian yang lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti memiliki kesempatan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pengaplikasian ilmu pengembangan masyarakat yang telah dipelajari selama kuliah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi tentang pembinaan pelaku usaha Kota Padang oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk peningkatan ekonomi masyarakat
- c. Di sisi lain, penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang analisis strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam pengembangan pelaku usaha.

D. Penjelasan Judul

Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, penulis perlu memberikan penjelasan judul sebagai berikut:

Pembinaan	Proses, pembuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan
-----------	---

yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹³

Pelaku Usaha Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁴

Dinas Koperasi dan UKM Unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil serta menengah yang menjadi kewenangan daerah.¹⁵

Peningkatan Upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas.¹⁶

Ekonomi Semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga dan dalam perkembangannya kata rumah

¹³ Departemen dan Pendidikan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) Cet.2, h. 23

¹⁴ Endah Truwulandari, “*Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*” (Jakarta: Damera Press, 2022) h. 31

¹⁵ **Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.** *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.*

¹⁶ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu & Aplikasi Pendidikan* (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2007), 24

tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu bangsa dan dunia.¹⁷

Jadi, yang dimaksud dengan judul pembinaan pelaku usaha Kota Padang oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi masyarakat adalah suatu proses yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang untuk membina, membimbing, dan memberdayakan para pelaku usaha baik individu maupun badan usaha dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha mereka, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	:	Berisikan latar belakang masalah, rumusan
PENDAHULUAN		masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.
BAB II KAJIAN	:	Pada bab ini menguraikan beberapa teori yang
PUSTAKA		memiliki keterkaitan dengan penelitian yaitu teori pembinaan, teori tentang pelaku usaha,

¹⁷ Iskandar Putong, "Economics Pengantar Mikro dan Makro" (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) h. 1

teori tentang UMKM, teori tentang peningkatan ekonomi masyarakat, teori pembinaan masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN : Berisikan metode penelitian yang digunakan dimulai dari jenis penelitian, lokasi penelitian. data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan kerangka teori.

BAB IV HASIL PENELITIAN : *Pertama*, pengembangan keterlampiran pelaku usaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. *Kedua*, penguatan kapasitas pelaku usaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. *Ketiga*, peningkatan kesadaran diri masyarakat dalam melakukan usaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

BAB V PENUTUP : Menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran yang diberikan dari hasil penelitian.

